

Survei Indo Barometer, Elektabilitas Prabowo-Gibran Tertinggi dari Paslon Lain

JAKARTA (IM) - Berdasarkan survei Indo Barometer, elektabilitas pasangan calon presiden - wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tertinggi dibandingkan dua pasangan lainnya.

"Untuk simulasi pasangan capres-cawapres (pertanyaan terbuka), pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menempati posisi teratas, dengan angka 34,2 persen," tulis Peneliti Indo Barometer Christopher Nugroho dalam keterangannya, Sabtu (11/11).

Kemudian disusul pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan angka 26,2 persen. Sementara itu, elektabilitas capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berada pada urutan ketiga dengan angka 18,3 persen.

Dalam survei ini, sebanyak 13,4 persen respon-

den belum menentukan pilihan dan 3,9 persen responden tidak bersedia menjawab. Ada pula sebanyak 3,3 persen responden memilih merasa sia-sia pilihannya, dan 0,7 persen menyatakan tidak akan memilih.

Hasil yang tidak jauh berbeda juga terjadi ketika peneliti Indo Barometer mengajukan pertanyaan tertutup tiga capres cawapres. "Dari pertanyaan tertutup terhadap tiga nama calon presiden, Prabowo Subianto paling banyak dipilih," ujar Christopher.

Survei ini diketahui dilakukan pada periode 25-31 Oktober 2023 dan melibatkan 1.230 responden. Metode penarikan sampel, yakni multistage random sampling. Adapun, margin of error survei ini kurang lebih 2,79 persen dan tingkat kepercayaannya 95 persen. ● mei

Anies: BUMN Tak Semestinya Dipakai untuk Cari Keuntungan Bagi Pemerintah

JAKARTA (IM) - Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan ingin membenahi cara kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Anies, BUMN tidak semestinya dipakai untuk mencari keuntungan bagi pemerintah.

"Negara itu dua tangannya, satu, birokrasi. Dua, korporasi (BUMN). Dua-duanya menjalankan fungsi pembangunan, karena itu, dalam pandangan negara, korporasi milik negara tidak boleh dipandang sebagai cara meningkatkan pendapatan negara," papar Anies di talkshow Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Perumahan Seluruh Indonesia (Aperisi) di Hotel Vertu, Harmoni, Jakarta, Jumat (10/11).

Anies menyebut bahwa negara sudah menerima pendapatan dari pajak dan pengelolaan sumber daya alam (SDA). Maka BUMN mestinya hadir untuk mengerjakan sektor yang tak bisa digarap oleh pihak swasta.

"Korporasi ini, tugasnya bukan mencari profit, tapi menciptakan benefit karena itulah dia milik negara," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Kalah perusahaan, BUMN itu ditekannya untuk menghasilkan profit maka potensi conflict of interest-nya besar. Di satu sisi adalah negara merupakan regulator, di sisi lain, dia adalah market player," ujar Anies.

Anies menganggap bahwa BUMN harus menjadi pihak yang membantu kemudahan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Pasalnya, banyak bank yang memberikan kredit itu justru merupakan BUMN. Tapi, proses pemberian KPR dirasa sulit untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal.

"Lah kalau penyelenggara negara harusnya negara memberikan fleksibilitas sehingga siapa saja bisa mengakses (KPR)," katanya. ● mei

TGB Zainul Majdi: Ganjar-Mahfud Bawa Pemerataan dan Keadilan

JAKARTA (IM) - TGB HM Zainul Majdi mengatakan, calon presiden dan calon wakil presiden, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, bukan pemimpin yang dipole.

"Saya pernah berkhidmat sebagai Gubernur NTB. Ketika melihat tokoh, tidak semata karena polesan. Saya melihat rekam jejak dan penghidmatan dari keduanya (Ganjar-Mahfud)," katanya dalam Sharing session dan deklarasi Pemuda Unggul Kabupaten Situbondo untuk Ganjar-Mahfud di Gedung Serbaguna Pasir Putih, Minggu (12/11).

TGB yang hadir didampingi Deputi Teritori Kinetik Komjen (Pol) Luki Hermawan melanjutkan, Indonesia ke depan harus melihat kebutuhan. Dari ketiga capres dan cawapres, ada sosok Prof Mahfud MD yang terus menyuarakan keadilan.

"Tanpa keadilan susah wujudkan kemakmuran," bebernya.

Ketua Harian Nasional Partai Perindo ini menyebut para pendiri bangsa menyam-

paikan Indonesia butuh adil dan makmur. Ini sebagaimana yang tertuang dalam Surat Ar Rahman, langit kami tinggikan kami letakkan keadilan, baru setelah itu bumi diciptakan untuk manusia.

"Keadilan itu sudah ditempatkan dalam satu pondasi, sebelum manusia diciptakan, nilai keadilan itu sudah diciptakan. Karena itu nilai keadilan itu sangat penting," tegasnya.

"Prof Mahfud MD yang perjuangannya tidak diragukan, menyuarakan keadilan," katanya.

TGB menyinggung soal pemberian 17 juta liter solar subsidi untuk nelayan kemudian ada Rp24 triliun 2023 untuk subsidi pupuk.

"Tapi solar itu kemana, tidak jarang pupuk hilang dari pasar," ucapnya.

Dikatakan, infrastruktur di Indonesia saat ini sudah bagus. Kalau tidak dikelola dengan baik keadilan susah terwujud. Soal kemakmuran butuh pemerataan kesejahteraan.

"Pak Ganjar 10 tahun memimpin Jateng, gini rasio dibawah rata-rata nasional. Seperti kata Haji Rhoma supaya yang kaya tidak makin kaya, yang miskin tidak makin miskin," ucapnya.

TGB mengajak, semua peserta yang hadir membawa kekompatan ini ke masing-masing ke lingkungan sekitar. Menyampaikan pada keluarga dan teman. ● mei

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS KPU PAPUA BARAT DAYA

Komisiner KPU Papua Barat Daya bersama perwakilan Pemerintah Prov. Papua Barat Daya, Kejaksanaan Negeri Sorong menandatangani Zona Integritas di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu (12/11). Jelang Pemilu 2024, KPU Prov. Papua Barat Daya melakukan pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan KPU Papua Barat Daya.

UU Pemilu Digugat Lagi, Penggugat Minta Ancaman Penjara Pengajak Golput Dihapus

Seseorang menyuarakan ajakan untuk menjadi golput merupakan hak setiap warga negara. Sebab itu tak pantas dijebloskan ke dalam penjara.

JAKARTA (IM) - Warga bernama Jonatan Ferdyn mengajukan gugatan terhadap Pasal 515 UU Pemilu tentang delik pidana mengajak orang lain untuk golput. Menurutnya, delik tersebut bertentangan dengan HAM yang tertuang dalam UUD 1945.

Pasal a quo berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan menjangkitkan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat

suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Menurut penggugat, pemidanaan terhadap tindakan mendeklarasikan atau mengajak warga negara untuk menjadi golongan putih (golput) atau tidak menggunakan hak pilihnya tidak lagi relevan. Dia menilai pasal tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

"Dengan dilarangnya mendeklarasikan atau mengajak warga masyarakat golput pada saat pemungutan suara sudah kurang relevan lagi.

Sebab, hal ini justru merusak citra demokrasi negara hukum yang selama ini telah dibangun. Di samping itu, dilihat dari sisi masyarakat justru mematis sikap demokrasi dan penyampaian informasi bebas di muka umum," katanya sebagaimana tertuang dalam risalah yang dilansir MK, Minggu (12/11).

Pemohon menjelaskan, banyak orang yang bersikap apatis terhadap politik tidak lagi peduli atau mencari tahu makna golongan putih serta risiko yang diakibatkannya karena keberlakuan tersebut. Pemohon menekankan penyataan atau ajakan untuk golput merupakan hak setiap warga negara.

Jonatan mengatakan dalam pemberitaan Pemilu di media massa atau media sosial, ternyata tidak membuat semua orang mengetahui

tanggal pasti diadakannya Pemilu 2024. Kemudian, pada Pemilihan Umum 2019, hasil survei LSI yang diadakan sebulan sebelum hari pencoblosan menunjukkan mayoritas tidak mengetahui tanggal pasti diadakannya Pemilihan Umum.

Selain itu, Jonatan mengatakan banyak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya untuk memberikan suara di hari Pemilihan Umum. Sayangnya, menurut Jonatan, keterbatasan yang dimiliki sering menghambat mereka dalam mencoblos.

"Misalnya tidak ada bantuan untuk pergi menuju ke lokasi TPS dan tidak tersedia surat suara khusus bagi disabilitas," ucapnya.

Menurutnya, penyampaian berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan harus dilindungi sesuai dengan amanah Undang-Undang. Dia mengatakan hal itu merupakan bagian dari HAM.

"Pasal 515 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama dimaknai sebagaimana yang saat ini tertulis dalam teks UU Pemilu," ujar Jonatan.

Menanggapi permohonan pemohon, Hakim Kontitusi Suhartoyo menyarankan pemohon untuk membaca

Peraturan MK tentang tata beracara. Selain itu, dia menyebut dalam menguraikan kerugian konstitusional harus jelas.

"Nanti Jonatan bisa melihat putusan-putusan MK. Kemudian untuk legal standing, harus menguraikan anggapan kerugian konstitusionalnya apa. Dalam uraian selanjutnya menguraikan tentang pemohon merupakan anak ketiga dan memiliki dua abang kandung, ini konteksnya apa? Dalam perspektif saudara ada kerugian konstitusional itu. Harus tegas apakah saudara mempunyai hak pilih apakah ini kemudian apakah ini menggugah hak konstitusional yang lain yang berkaitan sistem ke pemilu. Jadi harus clear dalam menguraikan kerugian konstitusional yang dirugikan," urai Suhartoyo.

Sementara hakim MK Saldi Isra meminta pemohon untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional pemohon dengan berlakunya norma ini.

"Kalau tidak ada penjelasan anda bisa dianggap tidak memiliki legal standing. Lalu pasal di konstitusi mana yang dijadikan rujukan untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional itu," terang Saldi.

MK memberi waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan. Adapun perbaikan permohonan paling lama diterima oleh Kepaniteraan MK pada Rabu, 22 November 2023 pukul 09.00 WIB. ● han

Dalam Vonis Johnny Plate Disebut Uang Korupsi BTS 4 G Juga Mengalir ke Menpora Dito Ariotedjo

JAKARTA (IM) - Dalam vonis mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate yang dibacakan Majelis Hakim, uang korupsi BTS 4G disebut mengalir ke Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo.

Dito Ariotedjo tidak mau berkomentar banyak terkait namanya yang disebut dalam vonis Johnny G Plate.

"Baca putusannya saja," kata Dito singkat saat ditemui Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (10/11).

Dito menyampaikan, namanya disebut bukan di bagian pertimbangan. Ia pun tidak berkomentar lebih lanjut mengenai namanya di pusaran kasus korupsi tersebut.

"Bukan menimbang, baca putusannya saja yang lengkap," kalihnya lagi.

Dalam sidang vonis Plate,

hakim menyampaikan bahwa uang yang didistribusikan oleh dua terdakwa, yaitu Irwan Hermawan dan Windi Purnama masuk ke sejumlah pihak, salah satunya Dito Ariotedjo.

Irwan disebutkan menyerahkan uang sebesar Rp 27 miliar di rumah Dito untuk tujuan penghentian proses pengekangan hukum terhadap proyek pembangunan BTS 4G tahun 2021-2022.

Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Johnny. Eks Menkominfo itu disebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5.

Johnny terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain menghukum 15 tahun, Majelis Hakim juga menghukum Johnny Palte membayar denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar akan diganti dengan kurungan selama 6 bulan.

Jhonny Plate juga dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 15,5 miliar. Jika tidak dapat mengganti dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang. "Jika harta bendanya tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun," ujar anggota Majelis Hakim. ● mar

Sejumlah Tokoh Sebut Nepotisme Dipertontonkan Tanpa Rasa Malu

REMBANG (IM) - Sejumlah yang mengatasnamakan Majelis Permusyawaratan Rembang (MPR) bersilaturahmi ke Kediaman Gus Mus (KH Mustofa Bisri) di Rembang, Jawa Tengah, Minggu (12/11).

Tokoh yang hadir pada silaturahmi tersebut, di antaranya Sinta Nuriyah Wahid, Goenawan Mohamad, Nisaruddin Umar, Frans Magnis-Suseno, Rhenald Kasali, Erry Riyana Hardjapamekas, Lukman Hakim Saifuddin, dan lainnya. Namun pada konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube, hanya beberapa tokoh yang hadir.

Salah satu yang hadir adalah istri cendekiawan muslim almarhum Nurcholis Madjid yaitu Omi Komaria Madjid. Dia mengaku datang ke kediaman Gus Mus untuk menyampaikan unek unek pribadinya melihat kondisi bangsa saat ini.

"Saya curhat karena saya merasa sedih kesal dan marah. Itu semua karena dipicu oleh suatu kenyataan bahwa KKN, yang kita perjuangkan pada reformasi 1998 dan itu merupakan pekerjaan utama untuk kelangsungan negara, saat ini tidak ditunaikan secara sungguh-sungguh," katanya.

Menurutnya, KKN justru semakin menggurita dalam pelaksanaan penyelengga-

raan negara. Padahal, negara mestinya menjadi wadah atau tempat pengabdian kepada rakyat untuk kemajuan rakyat. "Tetapi itu semua sudah tidak ada rasanya, justru negara malah sudah diseleangkan jauh, menjadi ajang melakukan korupsi kolusi dan nepotisme. Sangat memprihatinkan sekali bahkan nepotisme kekuasaan Anda lihat sendiri di tunjukkan dipertontonkan kepada kita semua secara terbuka tanpa rasa malu dan salah sama sekali," katanya.

Omi menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Padahal, para tokoh bangsa dan negara sudah sering mengingatkan atas tindakan tersebut. Karena akan membahayakan bangsa dan negara sebagaimana cita bangsa ini dari Reformasi 1998.

"Kekuasaan itu menjadikan orang tertutup hati nuraninya itu yang sangat memprihatinkan. Tapi kita juga ingat kalau bahwa kita tidak boleh menyerah kita harus terus bersuara. Saya masih menaruh harapan dan optimisme," ujarnya.

Dia mengajak kepada anak anak, rakyat Indonesia bersuara untuk mengawal kemajuan Indonesia mencapai tujuannya, sebagaimana telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa. ● han



AKSI BERSIH SUNGAI DI SOLO

Sejumlah personil TNI bersama warga dan relawan membersihkan sampah sungai untuk menyambut penyelenggaraan FIFA U-17 World Cup 2023 di Solo, Jawa Tengah, Minggu (12/11). Kegiatan yang digelar BBWS Bengawan Solo dan Forkopimda Kota Solo itu untuk menjaga keindahan dan kebersihan sungai sekaligus mengantisipasi terjadinya bencana banjir.

PENGUMUMAN
Berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 13 November 2023 Nomor 25 dibuat dihadapan MONIKA ANTONPUTRI, SH., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang. PT. PURI PANGAN SEJAHTERA, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, telah dibubarkan dan bagi para Pihak yang berkepentingan harap menghubungi Likuidatur yaitu Bapak PRADIPTA YUDHANEGARA, lahir di Jakarta, pada tanggal 08 Mei 1980, Warga Negara Indonesia, Pengacara, bertempat tinggal di Progan DKI Jakarta, Kepa Duri Nomor 70, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Dari Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, untuk menyelesaikan segala persoalan utang-piutang yang berkaitan dengan Perseroan terhitung di atas. Persoalan utang Piutang yang tidak diselesaikan kepada Likuidatur dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini dianggap selesai dan tidak menjadi tanggung jawab Likuidatur (UUPT Pasal 147 ayat 3).
Demikian pengumuman ini disampaikan harap semua pihak menjadi maklum.
Tangerang, 13 November 2023
Ttd
Likuidatur